

Perum Perikanan Jakarta Ajak Tinggalkan Penggunaan Air Tanah

JAKARTA (IM) - Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta lebih memilih menggunakan air pipa dan meninggalkan air tanah. Karena itu Perum Perikanan pun mengajak semua pihak untuk meninggalkan penggunaan air tanah.

Sudah sekitar enam tahun Perum Perikanan cabang Jakarta menggunakan air pipa dari Palyja. "Secara prinsip sudah terpenuhi. Terjamin, tidak mengalami kekurangan. Kebutuhan kami 3.000 meter kubik per hari. Air tanah tidak dipakai lagi," kata General Manager Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta, Suyono, Sabtu (25/9).

Menurut Suyono, ada beberapa alasan pihaknya meniadakan air tanah, salah satunya kualitas airnya tidak sebagus air pipa. "Di sini tingkat korosi tinggi, berbahaya. Selain itu, penggunaan air tanah menyebabkan penurunan tanah. Ini sangat berbahaya, lama-lama bisa tenggelam," katanya.

Dikatakan, pada awal Perum Perikanan berdiri, ada tiga sumur bor untuk memasok kebutuhan air. Sumur bor itu terakhir digunakan pada 2015. Perusahaan tersebut juga sempat menggunakan sumber lain, yaitu desalinasi air laut. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, karena biaya desalinasi air laut sangat tinggi.

"Karena pasokan dari Palyja sudah mencukupi, maka desalinasi air laut tidak digunakan lagi. Kami pakai hanya untuk maintenance untuk alat itu saja, jika didiamkan akan rusak," katanya.

Alasan lain memilih air pipa, karena biayanya murah, Rp 10.000 per meter kubik. Adapun harga air desalinasi jika dihitung mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per meter kubik.

Untuk desalinasi air laut ada rekanan, yang membantu

Perum Perikanan untuk pengoperasian. Namun, desalinasi tidak mampu memenuhi kebutuhan. Di samping itu juga, operasionalnya tergantung kondisi air laut juga. "Jika keruh air laut, makin tinggi biayanya," kata Suyono.

Dikatakan, Perum Perikanan Indonesia Cabang Jakarta yang terletak di Muara Baru, Jakarta Utara, sebenarnya telah menggunakan air perpipaan sejak sekitar 1984. Namun, pipanya sangat kecil dan air tidak lancar, sehingga mereka menggunakan air tanah. "Sejak 2016, Palyja mengganti pipa dengan ukuran pipa yang sangat besar, sehingga lancar semua," ujarnya.

Lebih jauh Suyono mengatakan, air perpipaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraktivitas di lahan 70 hektare. Lahan di lingkungan Perum Perikanan Indonesia tersebut untuk industri perikanan, perkantoran, dan pasar ikan modern.

"Air itu untuk memenuhi kebutuhan perkantoran, industri perikanan. Selain itu, kebutuhan operasional kapal yang bertambat. Setiap kali tambat di situ, maka kami yang mengisi air bersih mereka. Kita punya tangki reservoir, tenant kita 250 pelanggan," katanya.

Suyono mengaku tidak ada kendala berarti dalam penggunaan air pipa. "Paling gangguan listrik, kebocoran. Namun, tiap kita lapor ada masalah langsung ditindaklanjuti," ujar Suyono.

Dia berharap, Palyja dapat mempertahankan pelayanan dan terus meningkatkan pelayanan. "Agar air terus stabil. Tentu kualitas dan kuantitas air harus dijaga. Respons terhadap keluhan harus terus cepat. Kami mengajak semua pihak meninggalkan penggunaan air tanah," katanya. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PERINGATAN HUT KE-61 KARANG TARUNA

Ketua Majelis Pertimbangan Karang Taruna Gibran Raka-buming Raka (kiri) bersama Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna Didik Mukrianto (kanan) memberikan bantuan secara simbolis saat peringatan HUT ke-61 Karang Taruna dan Doa Lintas Agama Untuk Nusantara di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Minggu (26/9). Pada peringatan tersebut Gibran menginstruksikan Karang Taruna sebagai organisasi nasional untuk berkontribusi dalam menangani penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

SOROTI MOBILITAS WARGA JAKARTA JELANG AKHIR TAHUN

Puan: Pertahankan Status Zona Hijau di Jakarta

DKI menjelang Natal dan tahun baru biasanya banyak kegiatan. Untuk itu Puan Maharani meminta para petinggi di Ibukota bisa tetap mempertahankan status zona hijau di DKI Jakarta.

JAKARTA (IM) - Ketua

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menyoroti mobilitas warga DKI Jakarta menjelang akhir tahun nanti.

Dia menyebut, jika menjelang akhir tahun mobilitas warga tidak terkendali, tidak tertutup kemungkinan akan ada peningkatan kasus Covid-19.

"Apalagi ya itu, DKI menjelang Natal dan tahun baru biasanya banyak kegiatan walaupun situasi Covid ini tidak mungkin kita lakukan

kegiatan saat normal. Nah ini yang harus tentu dijaga ya," kata Puan di SMKN 72, Tegalluar, Jakarta Barat, Minggu (26/9).

Dia meminta para petinggi tetap mempertahankan status zona hijau di DKI Jakarta. Terlebih, kini sebagian besar wilayah Jakarta sudah menyanggah status zona hijau.

"Saya minta yang paling masalah itu bagaimana mempertahankannya agar tetap bisa zona hijau terus," ucap Puan.

"Tentunya bersama tiga pilar jajarannya," sambungnya.

Puan juga menyoroti wilayah Jakarta Barat yang terkenal akan penduduknya yang padat. Dalam kunjungannya ke gerai vaksin di SMKN 72 Jakarta Barat yang berlokasi di wilayah padat penduduk, Puan menyebut salah satu permasalahan penyebaran Covid-19 berlokasi di wilayah padat penduduk.

"Saya memang datang ke tempat padat penduduk, karena memang di sinilah permasalahan lainnya. Kalau daerah yang nggak terlalu padat penduduk mungkin lebih mudah mengaturnya," jelas Puan.

"Justru di sini ini agak susah namun kita harus sama-sama menunjukkan kepedulian kita bahwa kita mau untuk susah payah demi kita semua. Bismillah, demi Indonesia," sambungnya.

Puan bahkan membandingkan kunjungannya ke

Provinsi Banten.

Dia menyebut banyak warga Banten yang menjalani vaksinasi di DKI Jakarta, begitu pun sebaliknya.

Ini disebabkan banyak sekali masyarakat Banten dan DKI Jakarta yang melakukan mobilitas antarprovinsi. Ini pulalah yang membuat pemerintah menerapkan aturan penekatan di perbatasan wilayah agar memastikan kedua wilayah tersebut aman.

"Makanya ini kita harus sebagai pemangku yang menjadi pemimpin wilayahnya ini. Kita harus sama-sama peduli, sama-sama bergotong royong bagaimana harus mengatasi hal tersebut," ungkapnya.

Hadir dalam acara vaksinasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, Wakapolda Metro Jaya, Irjen Wahyu Hadiningrat, dan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Mulyo Aji. ● yan

Terbentur Izin Orang Tua, 15% Remaja di DKI Belum Divaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Dinas

Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan faktor izin orang tua menyebabkan pencapaian vaksinasi terhadap anak dan remaja masih tersisa 15 persen, padahal vaksin Covid-19 untuk usia 12-17 tahun telah berjalan sejak awal Juli 2021 lalu.

"Sekarang ini masih ada 15 persen remaja yang harus kita dorong untuk segera vaksin. Penyebab masih adanya data itu, salah satu penyebabnya ialah izin orang tua yang tidak mau anaknya divaksin lantaran khawatir dengan efek sampingnya," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta, Dwi Oktavia di Jakarta, kemarin.

Dwi menyebutkan, dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan DKI hingga 24 September 2021 lalu tercatat 856.459 anak usia di bawah 18 tahun (12-17 tahun) yang sudah mendapat dosis pertama vaksin Covid-19.

Terlihat hal itu, Dwi menuturkan, pihaknya akan tetap mendorong para remaja tersebut bisa segera divaksin, termasuk juga memberikan vaksinasi pada semua orang ber-KTP DKI yang belum divaksin.

Kerja Sama

Salah satu caranya ialah menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah di Ibu Kota, guna memperoleh vaksinasi terhadap anak berusia 12-17 tahun.

"Kami akan berusaha menjangkau semua siswa, termasuk yang ber-KITP DKI yang sampai saat ini belum vaksin. Segala daya kami usahakan supaya remaja, guru, masyarakat lain yang belum divaksin bisa segera divaksin," ujarnya.

Dwi berharap para remaja ini bisa mendapatkan proteksi ekstra dari bahaya Covid-19. Terlebih, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menambah jumlah sekolah yang dibuka untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas.

"Nanti ada 1.509 sekolah yang dibuka untuk PTM Terbatas," ucap Dwi.

Diketahui, hingga 24 September 2021, capaian vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta sudah menembus angka 10,3 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,5 juta warga sudah mendapat suntikan dosis kedua vaksin Covid-19.

Walau demikian, 36 persen dari capaian vaksinasi tersebut ternyata bukan warga ber-KITP DKI Jakarta. ● yan

Ranju Paku Masih Berjejeran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

JAKARTA (IM) - Ranju

paku rangka payung masih berjejeran di ruas Jalan Jenderal Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono, Jakarta, meski pelaku penebar ranju telah ditangkap.

Dalam dua hari terakhir, relawan lawas sapu bersih ranju paku masih menemukan ranju paku rangka payung yang berjejeran.

Relawan Penyapu Ranju Paku Sapu Bersih (Saber) Community, Abdul Rohim mengatakan, dirinya masih banyak menemukan ranju paku rangka payung di Jalan Gatot Soebroto sejak Sabtu (24/9).

"Jalan Gatot Soebroto masih banyak ditemukan tebaran ranju jari-jari payung. Paling sepelempat kilo kurang," ujar Rohim, Minggu (26/9).

Sementara itu, pada hari Minggu pagi, ia juga menemukan sepelempat kilogram ranju paku rangka payung. Temuan ranju paku rangka payung ditemukan di Jalan Gatot Soebroto dekat Senayan

hingga Balai Kartini.

"Ruas jalan Gatot Subroto Senayan sampai Balai Kartini masih banyak ditemukan tebaran ranju jari-jari payung, harap berhati-hati," ujar Rohim.

"Meski pelaku penyebar ranju di ruas Jalan MT Haryono tertangkap tetapi harap hati-hati. Sanksi 9 tahun penjara tak membuat pelaku penyebar ranju takut apalagi jera," tambah Rohim.

Sebelumnya, seorang penebar ranju paku rangka payung tertangkap pada Kamis (23/9). Ia berinisial BIP (43) dan biasa beroperasi di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono. BIP seorang tukang tambal ban. Pelaku nekat menebarkan ranju paku rangka payung demi meraup keuntungan. Saat pengendaraan motor kempes ban akibat ranju, BIP berharap korban bisa mampir ke lapak tambal bannya. BIP kemudian menjual jasanya dengan harga tak wajar. Seperti ban dalam, ia jual dengan harga Rp 75.000. Padahal harga pasaran dijual Rp 25.000. ● yan



FOTO: ANT

AKSI INDONESIA DARURAT IKLIM

Aktivis melakukan aksi di Dukuh Atas, Jakarta, Minggu (26/9). Aksi yang bertepatan "Tolak Bala, Stop Bencana" ini untuk menyerukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan parlemen Indonesia agar segera menghentikan ketidakbijakan dalam menghadapi krisis iklim.

Disdik Kota Bekasi: Tidak Ada Paksaan Pelajar Beli Seragam Baru

BEKASI (IM) - Dinas

Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi mengimbau penjualan seragam tidak menyalahi aturan dan harus berdasarkan kesepakatan komite sekolah.

Sekretaris Disdik Kota Bekasi, Krisman menegaskan, pihaknya memastikan tidak ada keharusan bagi peserta didik baru, membeli seragam sekolah baru. "Prinsip tidak ada keharusan. Saya sudah berkali-kali memberikan penekanan dan saya sampaikan tidak ada keharusan, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan bagi murid, siswa baru untuk membeli seragam," kata Krisman, Minggu (26/9).

Ia menjelaskan, bagi siswa-siswi yang kurang mampu bisa menggunakan seragam yang tidak harus baru. Namun, untuk atributnya harus disesuaikan. Sedangkan pengadaan pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.

"Tidak ada unsur paksaan, tergantung dari orang tua siswa. Mereka pun sudah tergabung di dalam komite sekolah," jelas Krisman.

Ia mengungkapkan, kebijakan itu secara langsung sudah disampaikan kepada kepala sekolah. "Saya imbau tidak mengharuskan, tidak ada kewajiban. Kalau ada di koperasi dan harga sesuai dengan pasar lebih bagus lagi jika lebih murah. Kemudian orang tua datang beli seragam dan atribut, ya silakan," jelas Krisman.

Ia menambahkan, karena koperasi sekolah sudah sesuai aturan hukum dan memiliki badan hukum. Lantaran itu, prinsipnya sepakat soal seragam. Namun harganya juga harus wajar kalau bisa di bawah harga pasar.

"Seragam sekolah boleh menyediakan. Namun tidak boleh memaksa siswa atau orang tua murid untuk membeli. Apalagi dengan harga seaneh. Orang tua bebas beli di mana saja. Namun demikian koperasi niatnya juga bagus, memberikan pelayanan dan supaya terjangkau," ungkapnya.

Terkait adanya aduan masyarakat ke media sosial milik Disdik Kota Bekasi, pihaknya sudah mengawasi hal tersebut dan turun untuk melakukan krocek kelengkapan. Jika ada temuan soal kewajiban membeli seragam baru, tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan tegas dari Disdik Kota Bekasi.

"Kami membuka keran keterbukaan informasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kami sangat apresiasi dan sangat berterima kasih karena merupakan bagian dalam perbaikan ke arah lebih baik. Tentunya kami tindaklanjuti," tegas Krisman.

Seperti diketahui, sebagai upaya dalam pembinaan kesiswaan dan keterampilan siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMPN, maka siswa harus menggunakan pakaian seragam anak sekolah (PSAS). ● yan

Anies: Landainya Kasus Covid-19 di DKI Peran Jutaan Orang

JAKARTA (IM) - Gub

ubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan, DKI terus berupaya untuk mengendalikan Covid-19. Bahkan, dalam 24 jam terakhir, lanjut dia, kasus aktif Covid-19 di DKI berhasil turun ke angka 1.972 kasus.

Jumlah di bawah dua ribu kasus tersebut, kata Anies, menjadi yang terendah sejak 14 April 2020.

"Di balik landainya kasus Covid-19 di DKI, ada peran ribuan hingga jutaan orang, termasuk Anda yang membaca pesan ini," ujar Anies dalam akun resmi Instagramnya, Minggu (26/9).

Anies melanjutkan, dengan capaian tersebut, pihak Pemprov DKI menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya. Utamanya, pada warga DKI yang menerapkan protokol kesehatan lengkap dan telah divaksinasi sepenuhnya.

"Mari teman-teman ikut menjaga Jakarta. Jangan abai

karena kasus sudah landai, mari hadapi bersama sampai pandemi ini usai," ajak Anies.

Terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mengatakan, kondisi pandemi di DKI Jakarta hingga kini semakin terkendali. Hal itu terbukti dengan kasus aktif Covid-19 dalam 24 jam terakhir yang berjumlah 1.972 orang.

Lebih jauh, khusus positivity rate DKI dalam 24 jam terakhir, juga diklaim turun. Jumlah tersebut kini hanya berkisar 0,76 persen.

"Dengan jumlah testing jauh melebihi dari standar WHO, sekitar 11,5 kalinya," demikian pernyataan di akun resmi BPBD DKI, Minggu.

Bahkan, lanjut BPBD DKI, angka pemakaman dengan protokol ketat Covid-19 hingga Jumat lalu, juga menunjukkan rekor terendah, sekitar tiga pemakaman.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria,

menyoroti level PPKM DKI Jakarta yang belum turun karena vaksinasi wilayah aglomerasi BodeTABEK yang belum memadai. Namun demikian, pihaknya mengaku tak berkeberatan menyoal hal tersebut.

Riza mengatakan, belum turunnya level PPKM DKI meski kasus positif berkurang drastis dan vaksinasi melebihi target, memang capaian yang baik. Tetapi, aturan wilayah aglomerasi tadi, lanjut dia, memang harus dipahami lebih jauh.

"Karena kami harus memahami Jakarta kan tidak berdiri sendiri," jelasnya. Menurut Riza, kota-kota penyangga di sekitar Jakarta memiliki pengaruh dan interaksi kuat dengan DKI sendiri. Sehingga, pihaknya mendorong agar semua wilayah bisa membaik sesuai aturan pemerintah pusat. "Semuanya harus sama-sama baik sehingga baru diturunkan levelnya," tegas dia. ● yan

IDN/ANTARA



BEROLAHRAGA DI MASA PPKM

Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (26/9). Aktivitas warga yang berolahraga di kawasan tersebut masih ramai seiring penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).